DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA KESEPAKATAN	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA).....	I - 4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA).. ..	I - 4
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	II - 1
2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD	II - 1
2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	II - 3
2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	II - 5
2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	II - 7
BAB III PENUTUP	III - 1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Sebelum dan Sesudah Perubahan	II - 5
Tabel 2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kota Bukittinggi Tahun 2019 Sebelum dan Sesudah Perubahan	II - 6
Tabel 2.3. Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 Sebelum dan Sesudah Perubahan	II - 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa fungsi pemerintah daerah dan DPRD dalam pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang substansinya dimuat dalam berbagai dokumen kebijakan pembangunan. Esensi pembangunan adalah aktivitas yang berjalan secara simultan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dimana seluruh aktivitas tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi pedoman yang representatif dalam pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan jangka pendek yang merupakan terjemahan dari perencanaan pembangunan jangka menengah yang berisikan formulasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah selanjutnya akan dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) yang merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Dalam penyusunan KUA, perhatian terhadap perekonomian daerah merupakan salah satu fokus perhatian dalam penyusunannya, karena bagaimanapun juga pendapatan daerah yang diterima tidak terlepas dari kondisi perekonomian daerah. Ketersediaan dana dari pendapatan daerah tentunya akan digunakan dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 telah diformulasikan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 dengan tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota telah diimplementasikan dan dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 yang memuat pendapatan dan belanja daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan serta belanja pendukung atau *supporting* lainnya bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Namun, sebagai sebuah dokumen perencanaan dapat dipahami bahwa apa yang telah dirumuskan tersebut mungkin akan mengalami deviasi dalam pelaksanaannya. Menyikapi hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Penyusunan APBD Perubahan Provinsi, Kabupaten/Kota diawali dengan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (R-KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (R-PPASP) oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk lebih lanjut dibahas dan disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Sementara Perubahan APBD (PPASP) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (R-APBD Perubahan).

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan prioritas pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2019 saat ini secara umum telah sesuai dengan apa yang diharapkan walaupun harus diakui bahwa hal tersebut belum optimal. Dari sisi pendapatan, secara keseluruhan realisasinya sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 masih dibawah 50% yaitu sebesar Rp. 321.670.450.514,12 atau sebesar 43%. Tingkat capaian beberapa jenis PAD yang masih dibawah rata-rata total realisasi, antara lain:

- a. Pajak Hotel, realisasi sebesar 41,72% (Rp. 6.165.884.878,-);
- b. Pajak Restoran, realisasi sebesar 34,16% (Rp. 3.292.056.346,-);
- c. Pajak Reklame, realisasi sebesar 34,32% (Rp. 514.803.250,-);
- d. Pajak parkir, realisasi sebesar 40,19% (Rp. 199.920.539,-)
- e. Pajak Air Bawah Tanah, realisasi sebesar 25,74% (Rp. 25.739.407,-)

- f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, realisasi sebesar 25,40% (Rp. 939.706.190,-);
- g. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, realisasi sebesar 25,83% (Rp. 607.846.000,-);
- h. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, realisasi sebesar 43,13% (Rp. 1.293.935.000,-);
- i. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, realisasi sebesar 34,9% (Rp. 122.228.800,-);
- j. Retribusi Penyediaan dan penyedotan Kakus, realisasi sebesar 31,54% (Rp. 925.968.000,-);
- k. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, realisasi sebesar 30,22% (Rp. 2.134.971.635,-); dan
- l. Retribusi Tempat Khusus Parkir, realisasi sebesar 14,50% (Rp. 617.250.000,-).

Masih rendahnya capaian beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tersebut diatas disebabkan karena memang kecenderungan realisasi Pendapatan Asli Daerah baik dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ini bergerak pada Triwulan III dan IV setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, agar dapat diimplementasikan capaian kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada penyusunan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019, serta adanya kebutuhan untuk merealisasikan program/kegiatan baru perlu diformulasikan ke dalam KUA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Faktor penting lain yang juga menjadi perhatian untuk pelaksanaan anggaran tahun 2019 adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2018 hasil Audit BPK, serta Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

KUA Perubahan ini memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang diikuti dengan asumsi yang mendasarinya antara lain dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Penyusunan KUPA ini dimaksudkan antara lain untuk:

- (1) Kesamaan persepsi antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang dasar penyusunan RAPBD Perubahan yang dituangkan dalam KUPA;
- (2) Kesamaan rencana tindak dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan publik;
- (3) Keselarasan dan keserasian dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan kemampuan sumberdaya daerah.

Dengan demikian diharapkan terjadi sinergitas dan keterpaduan dalam penyusunan program dan kegiatan, penyediaan anggaran dan pelaksanaannya.

Sedangkan tujuan penyusunan KUPA ini adalah:

- (1) Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- (2) Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan APBD Perubahan.
- (3) Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari estimasi KUA sebelumnya.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 yang telah dirubah dengan Perda Nomor 3 tahun 2019;
31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
33. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi;
34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017;
35. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang;

37. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;
38. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019;

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII pasal 154 ayat (1) menyebutkan perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa

Beberapa hal yang menyebabkan Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD 2019 antara lain sebagai berikut :

A. Perubahan pada sisi Pendapatan, yaitu sebagai berikut :

1. Prakiraan besaran Pendapatan Asli Daerah yang tertuang pada APBD Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 116.596.840.823,- namun setelah dikaji berubah menjadi Rp. 117.114.132.627,-, dengan harapan diperoleh besaran pendapatan yang lebih riil sesuai potensi yang dimiliki.
2. Kebijakan Pemerintah Pusat tentang adanya tambahan Pendapatan bagi Kota Bukittinggi, yaitu dari Dana Perimbangan sebesar Rp. 4.626.775.000,-. Tambahan ini berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 12/PMK.07/2019 sebesar Rp. 209.985.000,-, dan dari Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan sebesar 1.329.599.000,- serta Dana Alokasi khusus Bidang Pariwisata sebesar Rp. 3.087.191.000,- dengan rincian DAK Fisik Bidang

Pariwisata sebesar Rp. 2.435.021.000,- dan DAK Non Fisik Dana Pelayanan sebesar Rp. 652.170.000,-

B. Perubahan pada Sisi Belanja, yaitu sebagai berikut :

1. Dengan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, maka harus diikuti dengan perubahan alokasi belanja sesuai dengan peruntukan masing-masing alokasi dana tersebut.
2. Prakiraan beberapa kegiatan pada beberapa SKPD yang perlu dilakukan pergeseran sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai target kinerja kegiatan.
3. Penyesuaian penganggaran belanja SKPD yang belum mencukupi untuk satu tahun anggaran yang disebabkan oleh target pendapatan yang tidak mencukupi guna pemenuhan belanja pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Belanja tersebut antara lain; belanja pengadaan, belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor, belanja modal infrastruktur yang belum bisa dianggarkan pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.
4. Penambahan beberapa kegiatan dalam rangka mendukung Hari Jadi Kota Bukittinggi di beberapa SKPD.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA pada pasal 154 ayat (1) huruf a diatas dijelaskan kembali dalam pasal 155 ayat (1) bahwa perkembangan asumsi yang tidak sesuai tersebut, dapat berupa kejadian pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada KUPA ini telah terjadi perubahan alokasi pendapatan dan belanja daerah untuk kegiatan, setelah dilakukan kajian teknis dan dinamika lapangan ataupun peraturan yang diturunkan oleh instansi terkait, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Selain itu juga diperlukan pergeseran anggaran beberapa kegiatan pada beberapa SKPD untuk memaksimalkan pencapaian kinerja kegiatan Tahun Anggaran 2019.

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka memaksimalkan kemampuan keuangan daerah, tanpa mengenyampingkan fungsi pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik, maka kebijakan pendapatan daerah pada Kebijakan Umum APBD Perubahan ini adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah terdiri dari komponen berikut, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari :
 - a. Hasil Pajak Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Dana Perimbangan
 - a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perubahan Pendapatan Asli Daerah sampai akhir Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan mencapai Rp. 117.114.132.627,- yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 517.291.804,- atau meningkat sebesar 0.44% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 116.596.840.823,-. Penambahan ini disebabkan terjadinya kenaikan pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa deviden dari Bank Nagari dan BPR Jam Gadang sebesar Rp. 1.164.563.279,- sementara pengurangan terjadi pada Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp.647.271.475,- yang bersumber dari tidak dipungutnya Retribusi dari WC di Pasar Atas.

2. Dana Perimbangan

Pendapatan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagian besar masih tergantung kepada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta lain-lain pendapatan yang sah.

Besaran Dana Perimbangan mengalami perubahan dari target awal yakni sebesar Rp. 558.320.304.000,- berubah menjadi Rp. 562.947.079.000,- atau bertambah sebesar Rp. 4.626.775.000,- (0,83%).

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.081.556.853,- yang terdiri dari : 1). Pendapatan Hibah; 2). Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; 3). Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Kenaikan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ini terjadi pada jenis pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.5.805.356.853,- dan penurunan pada komponen Pendapatan Hibah sebesar Rp.723.800.000,- yang bersumber dari Pendapatan Dana BOS sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 420-184-2019 yang telah tertampung dalam Penjabaran Pergeseran APBD T.A. 2019 (Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2019).

Guna mendukung terlaksananya kebijakan pendapatan untuk penyelenggaraan pembangunan diatas, maka kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Bukittinggi pada KUPA Tahun Anggaran 2019 ini akan dilakukan tindakan yang konsisten berupa hal-hal berikut :

- 1) Meningkatkan kemampuan manajerial SKPD pengelola pajak dan retribusi daerah untuk mengoptimalkan capaian penerimaan daerah.
- 2) Meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi melalui peningkatan monitoring, pengawasan dan evaluasi yang konsisten.
- 3) Mengoptimalkan pengelolaan dana yang bersumber dari pemerintah, sehingga dapat diserap dengan baik, dan mengurangi kembalinya dana yang telah dialokasikan ke Kas Negara, terutama dana yang ditransfer dari Pemerintah dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

- 4) Optimalisasi manajemen kas daerah, tanpa mengganggu substansi proses pembangunan, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Rincian Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 sebelum dan sesudah perubahan disajikan pada Tabel berikut :

Tabel. 2.1.
Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN	738.829.406.823,00	749.055.030.480,00	10.225.623.657,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	116.596.840.823,00	117.114.132.627,00	517.291.804,00
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	47.413.135.193,00	47.413.135.193,00	-
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	49.959.202.400,00	49.311.930.925,00	(647.271.475,00)
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.935.906.024,00	6.100.469.303,00	1.164.563.279,00
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	14.288.597.206,00	14.288.597.206,00	-
4.2.	DANA PERIMBANGAN	558.320.304.000,00	562.947.079.000,00	4.626.775.000,00
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.034.216.000,00	13.244.201.000,00	209.985.000,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	468.422.823.000,00	468.422.823.000,00	-
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	76.863.265.000,00	81.280.055.000,00	4.416.790.000,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	63.912.262.000,00	68.993.818.853,00	5.081.556.853,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	15.013.600.000,00	14.289.800.000,00	(723.800.000,00)
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.885.438.000,00	28.690.794.853,00	5.805.356.853,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26.013.224.000,00	26.013.224.000,00	-
4.3.5.	Bantuan Keuangan	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Prinsip belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum daerah yang mengurai ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

Pada Tahun 2019 ini, terjadi perubahan kebijakan Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terjadi pengurangan sebesar Rp. 10.976.582.744,12 atau turun 3,29% dari kebijakan awal, dimana pengurangannya terjadi pada Belanja Pegawai sebesar Rp. 9.976.582.744,12 atau turun 3,19% dan Belanja tidak terduga yang mengalami penurunan sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- dari APBD awal atau sekitar 50%

Kemudian Belanja Langsung bertambah sebesar Rp. 34.792.529.199,- atau terjadi kenaikan sebesar 6,5% dari rencana semula sebesar Rp. 533.598.887.773,-. Pengurangan terbesar pada rincian belanja langsung SKPD berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebesar Rp. 5.636.705.086,-. Sementara penambahan terbesar belanja langsung SKPD berada pada Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, sebesar Rp. 5.550.110.880,00 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp. 5.358.069.726,-

Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebelum dan sesudah perubahan anggaran tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	%
2	3	4	5	
			-	
BELANJA	867.381.807.694,00	891.197.754.148,88	23.815.946.454,88	2,75%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	333.782.919.921,00	322.806.337.176,88	(10.976.582.744,12)	-3,29%
Belanja Pegawai	311.823.688.624,00	301.847.105.879,88	(9.976.582.744,12)	-3,19%
Belanja Hibah	15.308.252.629,00	15.308.252.629,00	-	0,00%
Belanja Bantuan Sosial	4.033.160.000,00	4.033.160.000,00	-	0,00%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	617.818.668,00	617.818.668,00	-	0,00%
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	-50,00%
BELANJA LANGSUNG	533.598.887.773,00	568.391.416.972,00	34.792.529.199,00	6,52%
JUMLAH BELANJA	867.381.807.694,00	891.197.754.148,88	23.815.946.454,88	2,75%

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan adanya defisit anggaran pada Tahun Anggaran 2019, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka dapat dimanfaatkan dana yang berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2018 yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Sumatera Barat dan rasionalisasi belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 75.000.000.000,- setelah di audit berubah menjadi Rp. 88.590.322.797,88,- akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA). Ketiga hal ini terkait erat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 yang diparipurnakan oleh DPRD Kota Bukittinggi.

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah diperkirakan hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018.

Adapun Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada Perubahan APBD tahun anggaran 2019 ini, pengeluaran pembiayaan tidak dialokasikan dimana pada tahun sebelumnya dialokasikan berupa Investasi Pemerintah Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang.

Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi tahun 2019 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan adalah seperti tabel berikut.

Tabel 2.3
Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019
Sebelum dan Sesudah Perubahan

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	%
1	2	3	4	5	6
6.	PEMBIAYAAN	128.552.400.871,00	142.142.723.668,88	13.590.322.797,88	10,57%
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	128.552.400.871,00	142.142.723.668,88	13.590.322.797,88	10,57%
6.1.1.	SiPa Tahun Anggaran Sebelumnya	75.000.000.000,00	88.590.322.797,88	13.590.322.797,88	18,12%
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	53.552.400.871,00	53.552.400.871,00	-	0,00%
	<i>Pembangunan RSUD</i>	<i>53.552.400.871,00</i>	<i>53.552.400.871,00</i>	-	0,00%
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	128.552.400.871,00	142.142.723.668,88	13.590.322.797,88	10,57%
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			-	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	128.552.400.871,00	142.142.723.668,88	13.590.322.797,88	10,57%

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Dari tabel diatas, perubahan kebijakan pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun 2019 dari sisi penerimaan pembiayaan daerah bertambah sebesar Rp. 13.590.322.797,88,-. Angka ini berasal dari penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dari selisih estimasi/proyeksi SiLPA pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 setelah Paripurna DPRD Kota Bukittinggi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 yang telah diaudit BPK.

BAB III

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ini dibuat yang berisikan Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD, Perubahan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Bukittinggi, Juli 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI

selaku,
PIHAK PERTAMA

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

selaku,
PIHAK KEDUA

BENY YUSRIAL, S.IP
KETUA

H. TRISMON, SH
WAKIL KETUA

YONTRIMANSYAH, SE
WAKIL KETUA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

**NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :**

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH**
Jabatan : Walikota Bukittinggi
Alamat Kantor : Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah
Bukittinggi.

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi.

2. a. Nama : **BENY YUSRIAL, S.IP**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi.
- b. Nama : **H. TRISMON, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi.
- c. Nama : **YONTRIMANSYAH, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi.

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019, perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Bukittinggi,

2019

WALIKOTA BUKITTINGGI

**selaku,
PIHAK PERTAMA**

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**selaku,
PIHAK KEDUA**

**BENY YUSRIAL, S.IP
KETUA**

**H. TRISMON, SH
WAKIL KETUA**

**YONTRIMANSYAH, SE
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA KESEPAKATAN	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.3. Dasar Hukum	I-2
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019	
2.1. Asumsi Pendapatan Daerah	II-1
2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	II-1
2.2.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah	II-2
2.2.2. Perubahan Dana Perimbangan	II-3
2.2.3. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	II-4
2.2.4. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019.....	II-5
2.2.5. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.....	II-5
BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019	III-1
BAB IV PENUTUP	IV-1
Lampiran I Daftar Nama Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang	
Lampiran II Daftar nama Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019	II-5
Tabel 3.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung per SKPD	III-2
Tabel 3.2. Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019	III-3
Tabel 3.3. Rincian Perubahan Plafon Anggaran SKPD Per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019	III-4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 didukung oleh APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019. Penyusunan APBD tersebut berangkat dari kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 yang telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Penyusunan APBD dilakukan melalui tahapan yang telah diatur oleh peraturan perundangan berlaku, antara lain melalui kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019. Berdasarkan Nota Kesepakatan tentang KUA dan PPAS tersebut disusun Rancangan APBD yang kemudian dibahas dan disepakati menjadi APBD. APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 telah dijalankan, namun seiring dengan perjalanan waktu dan adanya perubahan kebijakan anggaran daerah, menuntut perlu dilakukan perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019. Perubahan APBD tersebut perlu dilaksanakan agar target kinerja yang telah ditetapkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap dapat dicapai.

Sebelum perubahan APBD, sesuai ketentuan perlu disepakati Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (RKUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang penyampaianya dapat dilakukan secara bersamaan. Dengan demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD ini disusun sebagai tindak lanjut dari telah disepakatinya Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan DPRD Kota Bukittinggi. Dimana perubahan ini memuat penyesuaian target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan Pemerintah Daerah yang disertai dengan target pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang diikuti dengan asumsi yang mendasarinya antara lain dengan tetap mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2019 ini adalah untuk mencapai kesamaan dan kesepakatan terhadap perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan RAPBD Perubahan.

Adapun tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2019 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2019 dan memberikan landasan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, selanjutnya akan dijabarkan oleh masing-masing SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
33. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi;
34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017;
35. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang;

37. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;
38. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019;
39. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dalam Pasal 154 dan pasal 155 disebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Perubahan APBD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- 3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- 4) Keadaan darurat; dan
- 5) Keadaan luar biasa.

Dalam perjalanan pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan asumsi pada awal perencanaan, asumsi tersebut meliputi asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

2.1. Asumsi Pendapatan Daerah

Perubahan asumsi pendapatan daerah yang mengalami kenaikan disebabkan adanya perubahan pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada APBD awal 2019, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 738.829.406.823,00 dan setelah perubahan menjadi Rp. 749.055.030.480,00.

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak

daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Setiap kelompok pendapatan tersebut, kemudian dirinci kembali dalam jenis pendapatan. Khusus PAD, penerimaan pendapatan daerah akan dihitung berdasarkan potensi riil. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dari sisi pendapatan daerah terdapat perubahan pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.2.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- a. Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - 1) Retribusi Jasa umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pemakaman dan pengabuan mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
 - 2) Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Izin Trayek.
 - 4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bersumber dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
 - 5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berasal dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda Atas

Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan Penerimaan Lain-lain Pendapatan.

Perencanaan target PAD mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah. Peningkatan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan. Sementara itu, perencanaan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2019 sebelum perubahan sebesar Rp. 116.596.840.823,00 yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp. 47.413.135.193,00 Retribusi Daerah sebesar Rp. 49.959.202.400,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 4.935.906.024,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.14.288.597.206,00.

Secara umum Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan mengalami peningkatan, yang awalnya adalah sebesar Rp. 116.596.840.823,00 menjadi sebesar Rp.117.114.132.627,00 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp. 517.291.804,00.

2.2.2. Perubahan Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan pada Tahun 2019 sebelum perubahan berjumlah Rp. 558.320.304.000,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 562.947.079.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 4.626.775.000,00.

Perubahan komposisi dana perimbangan tersebut disebabkan oleh adanya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 209.985.000,00. DBH-CHT tersebut telah dianggarkan pada Dinas Kesehatan dengan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular serta kegiatan Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Kesehatan (DBH-CHT) Tahun 2019.

Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini masih dianggarkan sama dengan APBD awal 2019, walaupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang APBN 2019, bahwa Dana Alokasi Umum yang akan ditransfer ke daerah bersifat tidak tetap, tetapi kemungkinan besaran DAU akan tetap karena kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa tidak adanya Perubahan APBN 2019.

Khusus pos Dana Alokasi Khusus (DAK) terdapat penambahan sebesar Rp. 4.416.790.000,- yang bersumber dari DAK Bidang Perdagangan sebesar Rp.1.329.599.000,00 dan DAK Bidang Pariwisata sebesar Rp. 3.087.191.000,- dengan rincian DAK Fisik Bidang Pariwisata sebesar Rp. 2.435.021.000 dan DAK Non Fisik Dana Pelayanan Pariwisata sebesar Rp. 652.170.000,-

2.2.3. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah, yang terdiri dari Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, yang terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, Bagi Hasil dari Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Dana terdiri dari Dana Infrastruktur Daerah (DID).
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, yang terdiri dari Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam anggaran Tahun 2019 adalah Rp. 63.912.262.000,00 menjadi sebesar Rp. 68.993.818.853,00. Hal ini disebabkan karena penambahan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp. 5.805.356.853,00 dan pengurangan sebesar Rp.723.800.000,00 yang berasal dari alokasi Dana BOS.

Alokasi dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/04/PJK-B.keuda/2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Nagari/desa.

2.2.4. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

Perkiraan Perubahan Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN	738.829.406.823,00	749.055.030.480,00	10.225.623.657,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	116.596.840.823,00	117.114.132.627,00	517.291.804,00
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	47.413.135.193,00	47.413.135.193,00	-
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	49.959.202.400,00	49.311.930.925,00	(647.271.475,00)
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.935.906.024,00	6.100.469.303,00	1.164.563.279,00
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	14.288.597.206,00	14.288.597.206,00	-
4.2.	DANA PERIMBANGAN	558.320.304.000,00	562.947.079.000,00	4.626.775.000,00
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.034.216.000,00	13.244.201.000,00	209.985.000,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	468.422.823.000,00	468.422.823.000,00	-
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	76.863.265.000,00	81.280.055.000,00	4.416.790.000,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	63.912.262.000,00	68.993.818.853,00	5.081.556.853,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	15.013.600.000,00	14.289.800.000,00	(723.800.000,00)
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.885.438.000,00	28.690.794.853,00	5.805.356.853,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26.013.224.000,00	26.013.224.000,00	-
4.3.5.	Bantuan Keuangan	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.2.5. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut.

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
2. Kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dengan pihak III.
3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
4. Pemberian penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
5. Peningkatan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan.
6. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
7. Pengoptimalkan upaya-upaya untuk memperoleh bagian pendapatan yang lebih besar dari pemerintah pusat dengan memperkuat jaringan yang sudah ada dan memperluas jaringan serta peningkatan koordinasi dan informasi.
8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya dengan proses yang jelas
9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

Selain kebijakan umum pendapatan seperti tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Bukittinggi juga mengupayakan sumber pendanaan lainnya untuk melakukan percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Percepatan tersebut dengan melakukan upaya-upaya pemasaran program kepada pihak-pihak lain seperti lembaga-lembaga donor / *founding*, BUMN lewat *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan mengikuti program-program khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat / Provinsi maupun Pemerintah Kota Bukittinggi.

BAB III

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM / KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Sesuai dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019, salah satu perubahan kebijakan adalah perubahan pada sisi belanja yang disebabkan oleh beberapa hal. Sejalan dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2019, pada Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 terjadi kenaikan pada sisi belanja sebesar Rp. 23.815.946.454,88,- dari APBD awal sebesar Rp. 867.381.807.694,00 sehingga Belanja Daerah menjadi sebesar Rp. 891.197.754.148,88. Pada Belanja Tidak Langsung terjadi penurunan sebesar Rp. 10.976.582.744,12 dan pada Belanja Langsung terjadi kenaikan sebesar Rp. 34.792.529.199,00.

Pengurangan terbesar pada rincian belanja langsung SKPD berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebesar Rp. 5.636.705.086,00. Sementara penambahan terbesar belanja langsung SKPD berada pada Sekretariat Daerah, sebesar Rp. 5.550.110.880,00 dan Sekretariat DPRD sebesar 5.358.069.726,00

Rincian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Belanja Langsung per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung per SKPD

NO	SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5=4-3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85.930.066.123,00	80.293.361.037,00	(5.636.705.086,00)
2	Dinas Kesehatan	80.102.992.244,00	81.384.943.266,00	1.281.951.022,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	123.360.753.434,00	127.860.218.330,00	4.499.464.896,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	17.943.735.871,00	18.466.888.028,00	523.152.157,00
5	Dinas Kebakaran	2.852.842.850,00	2.999.574.640,00	146.731.790,00
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	12.732.806.915,00	13.112.285.715,00	379.478.800,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.958.350.000,00	2.054.915.000,00	96.565.000,00
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	4.563.940.494,00	4.713.675.150,00	149.734.656,00
9	Dinas Sosial	4.453.532.858,00	4.453.532.858,00	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.842.264.886,00	5.050.145.125,00	207.880.239,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	13.332.719.986,00	16.372.370.667,00	3.039.650.681,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.744.064.060,00	2.013.809.060,00	269.745.000,00
13	Dinas Perhubungan	7.931.089.653,00	8.474.802.053,00	543.712.400,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.631.369.610,00	4.796.123.780,00	164.754.170,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	6.198.587.755,00	7.101.470.069,00	902.882.314,00
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	17.502.266.832,00	16.725.559.310,00	(776.707.522,00)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.223.963.490,00	1.445.258.593,00	221.295.103,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	32.440.528.212,00	35.178.815.503,00	2.738.287.291,00
19	Dinas Pertanian dan Pangan	8.216.634.881,00	9.257.636.685,00	1.041.001.804,00
20	Sekretariat Daerah	26.556.605.248,00	32.106.716.128,00	5.550.110.880,00
21	Sekretariat DPRD	23.883.994.951,00	29.242.064.677,00	5.358.069.726,00
22	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	5.411.961.591,00	8.887.379.720,00	3.475.418.129,00
23	Kecamatan Guguk Panjang	13.775.037.449,00	16.392.448.139,00	2.617.410.690,00
24	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	8.495.265.400,00	10.673.693.396,00	2.178.427.996,00
25	Inspektorat	1.352.247.830,00	1.690.627.830,00	338.380.000,00
26	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	2.947.998.085,00	3.637.569.701,00	689.571.616,00
27	Badan Keuangan	13.631.226.410,00	18.147.005.067,00	4.515.778.657,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.582.040.655,00	5.858.527.445,00	276.486.790,00
	Total	533.598.887.773,00	568.391.416.972,00	34.792.529.199,00

Selanjutnya pada sisi Belanja Tidak Langsung, pada PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 ini terjadi penurunan sebesar Rp. 10.976.582.744,12 yaitu pengurangan Belanja Pegawai sebesar Rp. 9.976.582.744,12,- dan pada Belanja Tidak Terduga berkurang sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

Tabel 3.2.
Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah
Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	%
1	2	3	4	5	
5.				-	
5.1.	BELANJA	867.381.807.694,00	891.197.754.148,88	23.815.946.454,88	2,75%
5.1.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	333.782.919.921,00	322.806.337.176,88	(10.976.582.744,12)	-3,29%
5.1.4.	Belanja Pegawai	311.823.688.624,00	301.847.105.879,88	(9.976.582.744,12)	-3,19%
5.1.5.	Belanja Hibah	15.308.252.629,00	15.308.252.629,00	-	0,00%
5.1.7.	Belanja Bantuan Sosial	4.033.160.000,00	4.033.160.000,00	-	0,00%
5.1.8.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	617.818.668,00	617.818.668,00	-	0,00%
5.2.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	-50,00%
	BELANJA LANGSUNG	533.598.887.773,00	568.391.416.972,00	34.792.529.199,00	6,52%
	JUMLAH BELANJA	867.381.807.694,00	891.197.754.148,88	23.815.946.454,88	2,75%

Secara rinci plafon anggaran sementara masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) per program dan Kegiatan, Rekapitulasi Hibah dan Bantuan Sosial pada PPAS Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 ini terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen ini.

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ini dibuat, untuk digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

Bukittinggi, Juli 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI

**selaku,
PIHAK PERTAMA**

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**selaku,
PIHAK KEDUA**

**BENY YUSRIAL, S.IP
KETUA**

**H. TRISMON, SH
WAKIL KETUA**

**YONTRIMANSYAH, SE
WAKIL KETUA**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH**
Jabatan : Walikota Bukittinggi
Alamat Kantor : Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah
Bukittinggi

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi.

2. a. Nama : **BENY YUSRIAL, S.IP**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi.
- b. Nama : **H. TRISMON, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi.
- c. Nama : **YONTRIMANSYAH, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi.

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang meliputi rencana perubahan pendapatan, belanja dan penerimaan pembiayaan daerah, perubahan Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, program dan kegiatan, dan belanja tidak langsung, serta rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Bukittinggi, 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI

**selaku,
PIHAK PERTAMA**

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**selaku,
PIHAK KEDUA**

**BENY YUSRIAL, S.IP
KETUA**

**H. TRISMON, SH
WAKIL KETUA**

**YONTRIMANSYAH, SE
WAKIL KETUA**